

**STUDI KELAYAKAN KEBIJAKAN PENINGKATAN JUMLAH
PESERTA DIDIK SMK DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

Oleh:

**Endang Mulyatiningsih
Jurusan PTBB, FT, UNY.**

Alamat: kampus Karangmalang, 55281, Yogyakarta

e-mail: endang_mulyatiningsih@yahoo.com

HP: 085868008025

Abstrak

Kebijakan peningkatan jumlah peserta didik SMK sebesar 67% telah dicanangkan dalam Renstra Depdiknas tahun 2005-2009 maupun tahun 2010-2014. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan kebijakan peningkatan jumlah peserta didik SMK sebesar 67% tersebut di Daerah Istimewa Yogyakarta. Studi kelayakan digali dari animo masyarakat untuk mengakses pendidikan di SMK, program studi keahlian yang berpotensi dikembangkan, daya serap lulusan SMK, dan kesiapan sekolah untuk memperluas program studi keahlian SMK.

Penelitian menggunakan metode meta analisis dari hasil-hasil penelitian tentang SMK yang telah dilakukan oleh Lembaga Penelitian UNY pada tahun 2009. Data yang dikumpulkan berupa jumlah pendaftar SMK yang terdapat pada dokumen PPDB (Pendaftaran Peserta Didik baru), jumlah SMK dan jumlah peserta didik SMK menurut kompetensi keahlian, SMK yang menerapkan kebijakan peningkatan jumlah peserta didik SMK dan daya serap lulusan SMK. Data dilaporkan secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa animo masyarakat terhadap SMK cukup baik dengan perimbangan proporsi SMK:SMA sebesar 66:44 dan perimbangan jumlah siswa SMK:SMA sebesar 57:43. Kompetensi keahlian yang berpotensi dikembangkan adalah Mekanik Otomotif dan Akuntansi. Program studi keahlian yang cenderung menurun peminatnya adalah program studi Seni Pertunjukan. Daya serap lulusan berubah-ubah setiap tahun, daya serap yang tinggi terletak pada kompetensi keahlian Tata Kecantikan. SMK menghadapi kendala jumlah guru produktif dan industri pasangan masih kurang. Perluasan SMK sebaiknya dilakukan pada program studi keahlian yang memberi keterampilan berwirausaha atau banyak dibutuhkan oleh lingkungan industri. Perluasan SMK yang tidak disertai dengan perluasan lapangan kerja dan keterampilan berwirausaha rawan mengalami kejenuhan

Kata kunci: *kebijakan SMK, proporsi SMK:SMA, kompetensi keahlian SMK*

NO. MAKALAH	PENULIS	JUDUL MAKALAH	REKOMENDASI PERBAIKAN
80	Endang Mulyatiningsih	Studi Kelayakan Kebijakan Peningkatan Jumlah Peserta Didik SMK Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> Perbaiki makalah menjadi 30-40 hal

THE STUDI OF FEASIBILTY POLICY IN INCREASING THE NUMBER OF SMK STUDENT IN DIY PROVINCE

ABSTRACT

The policy to increase the number of SMK students to 67% has been planned in the Ministry of Education Strategic Plan 2005-2009 and 2010-2014. This study aims to analyze the feasibility of policy increasing the number of SMK students to 67% in Yogyakarta province. The feasibility study explored the public interest to access education at SMK, study programs that have the potential skills development, absorptive capacity of SMK graduates, and preparedness of schools to expand SMKs.

This research using meta-analysis from research results that has been done by UNY Research Institute in 2009. Data collected from the number of registrants at SMKs and the total number of SMK students by field of expertise, SMK which implementing policy of increasing the number of students and vocational school graduates absorption. Data are reported quantitative and qualitative description.

The results showed that the public interest to SMK's good enough the proportion of SMK: SMA at 66:44 and the balance between the number of SMK: SMA student at 57:43. Competency skills developed is high potential input automotive and accounting. Courses of study skills that tend to decrease is the Performing Arts. Absorption of graduates every year varies, the high absorption of expertise was in the competence of beautician. SMK is also facing the constraints of lacking teachers' productive and industrial partner. Expansion of SMK should be attached on study program which is given entrepreneurship or skill that needed by the industrial environment. Expansion of SMK that is not accompanied by the expansion of employment opportunities and entrepreneurship skills are prone to experiencing saturation

Kata kunci: policy of SMK, SMK:SMA proportion, skills competencies of SMK

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak	1
Abstract	2
Daftar Isi	3
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	4
B. Tujuan Penelitian	6
C. Ruang Lingkup	6
KAJIAN TEORI	
A. Landasan Kebijakan	7
B. Rasio Kebijakan Peningkatan Jumlah Peserta Didik SMK	8
METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	12
B. Sumberdata Penelitian	12
C. Metode Analisis Data	13
HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Animo Masyarakat DIY terhadap SMK	14
B. Pencapaian Proporsi SMK:SMA sebesar 67:33	18
C. Kelayakan Pengembangan Jenis Kompetensi Keahlian	19
D. Cara Peningkatan Jumlah Peserta Didik SMK	22
E. Daya Serap Lulusan SMK	23
F. Kesiapan Sekolah Memperluas SMK	25
G. Dukungan Pemerintah terhadap Kebijakan SMK	27
KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	27
B. Saran	28
DAFTAR PUSTAKA	29

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya mengatasi pengangguran menjadi salah satu program pembangunan di Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah menetapkan kebijakan membalik rasio jumlah peserta didik SMK:SMA yang sebelumnya berada pada proporsi 30:70 pada tahun 2004 menjadi 67:33 pada tahun 2014. Kebijakan ini ditujukan agar keluaran pendidikan dapat lebih berorientasi pada pemenuhan dunia kerja serta kebutuhan dunia usaha dan industri. Pemerintah menetapkan kebijakan peningkatan jumlah peserta didik SMK karena SMK memiliki paradigma pendidikan yang menyesuaikan dengan permintaan pasar (*demand driven*) guna mendukung pembangunan ekonomi kreatif.

Kebijakan peningkatan jumlah peserta didik SMK tersebut menuntut kesiapan tiap-tiap pemerintah daerah untuk menyediakan sarana prasarana, guru produktif SMK, industri pasangan dan lapangan kerja. Daerah Istimewa Yogyakarta sering menjadi contoh bagi daerah lain dalam implementasi kebijakan pendidikan sehingga kebijakan peningkatan jumlah peserta didik SMK dengan proporsi 67% SMK dan 33% SMA perlu dikaji kelayakannya. Keberhasilan kebijakan peningkatan jumlah peserta didik SMK antara lain dapat dilihat dari jumlah penyerapan lulusan dan kesesuaian bidang keahlian yang dipilih dan ditekuninya dengan bidang pekerjaan yang tersedia.

Harapan pemerintah untuk mengurangi jumlah pengangguran lulusan SMA melalui peningkatan jumlah peserta didik SMK belum dapat terpenuhi. Hasil survei tenaga kerja oleh Badan Pusat Statistik (BPS) memperoleh data angka pengangguran terbuka di Indonesia per Agustus 2008 mencapai 9,39 juta jiwa atau 8,39 persen dari total angkatan kerja. Angka pengangguran tersebut telah mengalami penurunan sebesar 0,7% dibandingkan posisi Februari 2008 yang tercatat sebesar 9,43 juta jiwa (8,46 persen). Menurut hasil survei BPS tersebut ditemukan pengangguran terbuka didominasi oleh lulusan Sekolah Menengah Kejuruan sebesar 17,26 persen dari jumlah penganggur. Kemudian disusul lulusan Sekolah Menengah Atas (14,31 persen), lulusan universitas

12,59 persen, diploma 11,21 persen, baru lulusan SMP 9,39 persen dan SD ke bawah 4,57 persen (Tempo interaktif. com, Senin, 05 Januari 2009).

Direktur Pembinaan SMK, Joko Sutrisno (Kompas Com, 26 Januari 2010) memberi keterangan yang senada bahwa pada tahun 2010 daya serap lulusan SMK ke pasar kerja sebesar 50 persen, dan sekitar 10 persen (80.000 - 90.000) lulusan SMK melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Data penyerapan lulusan SMK tersebut masih menyisakan sekitar 40% lulusan SMK yang belum diketahui nasibnya.

Dengan diberlakukannya UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang selanjutnya diikuti oleh PP No. 23/2004 tentang BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) dan PP No.31/2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, maka arah pengembangan SMK sudah jelas, yakni mempersiapkan tenaga kerja yang sesuai tuntutan lapangan kerja. Peningkatan jumlah peserta didik SMK yang tidak proporsional dengan kebutuhan dunia kerja dapat memberi konsekuensi pada terjadinya penumpukan jumlah tenaga kerja. Oleh sebab itu, peningkatan jumlah peserta didik SMK perlu mempertimbangkan banyak hal antara lain: potensi daerah untuk menyediakan lapangan kerja atau menyalurkan tenaga kerja ke daerah lain, pemilihan program studi keahlian yang relevan dengan kebutuhan industri dan peningkatan daya saing lulusan SMK dalam era global tenaga kerja.

Studi kelayakan kebijakan peningkatan jumlah peserta didik SMK dapat dikaji dari sudut pandang input, proses, outputnya. Dalam penelitian ini, aspek input dibahas dari animo masyarakat terhadap SMK, proporsi jumlah sekolah dan jumlah peserta didik SMK dan SMA serta program studi keahlian SMK. Aspek proses ditinjau dari kesiapan sekolah (guru, sarana prasarana serta industri mitra) dalam melaksanakan penambahan peserta didik SMK. Sedangkan aspek output dilihat dari daya serap lulusan SMK yang bekerja di industri maupun bekerja secara mandiri sebagai wirausaha. Studi kelayakan kebijakan peningkatan jumlah peserta didik SMK ini penting untuk memberi masukan kepada pemerintah tentang berapa proporsi jumlah peserta didik SMK:SMA yang ideal untuk wilayah perkotaan dan pedesaan, program

keahlian apa yang layak dikembangkan dan bagaimana cara mengimplementasikan kebijakan tersebut.

B. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari kelayakan penerapan kebijakan peningkatan jumlah peserta didik SMK menjadi 67%. Secara lebih rinci, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Animo masyarakat untuk mengakses pendidikan di SMK,
2. Pencapaian proporsi SMK:SMA sebesar 67:33
3. Kelayakan pengembangan program studi keahlian SMK
4. Cara peningkatan jumlah peserta didik SMK
5. Daya serap lulusan SMK,
6. Kesiapan sekolah untuk memperluas program studi keahlian SMK
7. Dukungan Pemerintah terhadap kebijakan peningkatan peserta didik SMK

C. Ruang Lingkup

Menurut rencana strategis Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010 – 2011, penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup kebijakan “**penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri**”. Pengembangan SMK bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri. Oleh sebab itu, studi kelayakan peningkatan jumlah peserta didik SMK sudah selaras dengan rencana strategis Kementerian Pendidikan Nasional tersebut.

Ruang lingkup studi kelayakan peningkatan jumlah peserta didik SMK dikaji dari kelayakan input, proses dan output. Kelayakan input dipelajari dari animo masyarakat untuk memilih SMK serta ketersediaan jumlah SMK. Kelayakan proses dikaji dari kesiapan SMK untuk menyelenggarakan pendidikan yang dikaji dari kesiapan guru, sarana prasarana serta industri pasangan sebagai tempat magang siswa SMK. Kelayakan output dikaji dari daya serap lulusan SMK baik yang bekerja mandiri maupun bekerja di industri.

KAJIAN TEORI

A. Landasan Kebijakan

Kebijakan peningkatan rasio jumlah peserta didik SMK:SMA dari 30:70 menjadi 67:33 tertuang dalam rencana strategis Departemen Pendidikan Nasional tahun 2005 – 2009 dan 2010 – 2014. Pemerintah telah merencanakan peningkatan jumlah peserta didik SMK secara proporsional termasuk upaya penataan bidang keahlian dan program studi di SMK serta fasilitas magang agar relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Penataan ini dilakukan agar lulusan sekolah menengah kejuruan dapat makin memadai untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja.

Perluasan penyelenggaraan pendidikan kejuruan dilaksanakan dengan menggunakan berbagai bentuk SMK, yaitu SMK Besar di kawasan Industri, SMK kelas jauh di Pesantren/institusi lain, SMK di daerah perbatasan, SMK kecil di daerah terpencil dan perdesaan, SMA Terbuka dan Sekolah Menengah Terpadu. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja menengah di sektor manufaktur, industri pengolahan, konstruksi, pertambangan, perdagangan, jasa kemasyarakatan, pariwisata, ICT, pertanian, serta teknologi dan seni (konservatori budaya), pemerintah akan meningkatkan jumlah peserta didik SMK, yang diproyeksikan akan meningkat secara signifikan sampai dengan tahun 2009. Tahun 2009 merupakan batas waktu untuk melakukan evaluasi keterlaksanaan kebijakan perluasan SMK. Pada tahun 2009, pemerintah mendorong peningkatan proporsi satuan pendidikan untuk dapat mencapai sama atau di atas SNP setidaknya-tidaknya mencapai 50% SMA dan 50% SMK (Renstra Depdiknas, 2005-2009). Melalui analisis SWOT pada tahun 2009, Depdiknas memperbarui rencana strategisnya dengan menetapkan proporsi SMK:SMA sebesar 67:33 (Renstra Depdiknas, 2010-2014).

Penentuan jurusan atau program studi keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mengacu kepada spektrum keahlian pendidikan menengah kejuruan yang diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah NOMOR: 251/C/KEP/MN/2008 TENTANG

SPEKTRUM KEAHLIAN PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN. Menurut keputusan tersebut terdapat 6 Bidang Studi Keahlian, 33 Program Keahlian dan 121 Kompetensi Keahlian. (1) kelompok keahlian Teknologi dan Rekayasa memiliki 18 Program Studi Keahlian dan 66 Kompetensi Keahlian; (2) Kelompok keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki 3 Program Studi Keahlian dan 9 Kompetensi Keahlian; (3) kelompok keahlian Kesehatan memiliki 2 Program Studi Keahlian dan 6 Kompetensi Keahlian, (4) kelompok keahlian Seni, Kerajinan dan Pariwisata memiliki 7 Program Studi Keahlian dan 22 Kompetensi Keahlian; (5) kelompok keahlian Agribisnis dan Agroteknolgi memiliki 7 Program Studi Keahlian dan 14 Kompetensi Keahlian, dan (6) kelompok keahlian Bisnis Manajemen memiliki 3 Program Studi Keahlian dan 4 Kompetensi Keahlian.

B. Rasio Kebijakan Peningkatan Jumlah Peserta Didik SMK

Sejak semula, pendidikan teknik dan kejuruan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja nasional. Landasan pengembangan pendidikan teknik dan kejuruan adalah: (1) menciptakan keseimbangan antara kebutuhan tenaga kerja untuk perluasan industri; (2) memenuhi aspirasi pendidikan masyarakat; dan (3) memenuhi kemampuan yang diperlukan untuk pembangunan dalam pengertian yang luas yang meliputi keterampilan, kecerdasan dan sikap yang sehat untuk bekerja (Soenaryo, 2002).

Bank Dunia yang bekerjasama dengan Depatemen Tenaga Kerja telah melakukan survei ketenagakerjaan dari tahun 1971 – 1981. Hasil survei kemudian digunakan untuk memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja menurut tingkat pendidikan sepuluh tahun kemudian. Kebutuhan tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan tersebut diproyeksikan dengan model piramida tenaga kerja (*manpower resources pyramid*) pada gambar 1:

Ideal Pyramid in the developed countries	Qualification of manpower	Institution where training received	Manpower pyramid in the developing countries
1	Professional technologist	University	
2	Higher technician	Polytechnic	
3	Industrial/trade technician	Technical high school (4 year)	
25	Tradesman/Craftsman	Technical high school (3 year)	
?	Semi skill worker	Short VTC training	
	Unskilled worker		

Gambar 1. *Manpower Resources Pyramid* (hasil studi world Bank dan Depnaker tahun 1971-1981, diambil dari Sunaryo (2002)).

Piramida tenaga kerja menurut tingkat pendidikan di negara berkembang relatif konstan. Kebutuhan tenaga kerja terampil level menengah relatif lebih banyak dibandingkan dengan tenaga kerja ahli dengan perbandingan 1:25 atau satu orang tenaga profesional lulusan universitas dengan 25 orang tenaga terampil lulusan SMK/SMA. Melalui analisis tersebut, pengembangan pendidikan kejuruan merupakan keputusan yang cukup strategis untuk dilaksanakan. Jumlah dan jenis keterampilan yang dibutuhkan tergantung pada pembangunan sektor ekonomi dan sub sektor lainnya. Pengembangan tenaga kerja diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sektor industri, bisnis dan jasa

Proyeksi kebutuhan tenaga kerja masih sesuai dengan fakta struktur ketenagakerjaan di Indonesia. Menurut data BPS tahun 2004, struktur tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan SLTA masih relatif tinggi dibandingkan lulusan perguruan tinggi. Angkatan kerja yang berpendidikan rendah (SD dan tidak tamat SD) di perkotaan lebih kecil dibandingkan daerah pedesaan sedangkan angkatan kerja yang berpendidikan menengah ke atas sebaliknya yaitu di perkotaan lebih besar daripada pedesaan. Struktur ketenagakerjaan di Indonesia dapat disimak pada tabel 1.

Tabel 1. Persentase Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Pedesaan dan Perkotaan Indonesia, tahun 2004

Tingkat Pendidikan	Tenaga Kerja		Angkatan Kerja	
	Pedesaan	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan
Tidak sekolah	10,8	4,6	9,7	3,4
Tidak tamat SD	19,3	9,6	20,1	9,5
SD	42,5	25,5	43,4	25,7
SLTP	17,3	23,5	15,5	19,3
SLTA Umum	5,5	19,5	5,8	19,9
SLTA Kejuruan	3,2	10,3	3,7	12,6
Diploma/Akademi	0,8	3,1	1,1	4,0
Universitas	0,6	3,9	0,7	5,6
	55,3	44,7	59%	41%

Sumber: BPS (2005), hasil Sakernas 2004, diolah ulang oleh Setyawan (2006)

Meskipun pengembangan SMK penting untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja namun pengembangan SMK seyogyanya memperhatikan prinsip-prinsip yang pernah dirumuskan oleh Charles Prosser (Abdurrahman, 2008). Pendidikan kejuruan akan efisien dan efektif antara lain jika:

- 1) lingkungan tempat peserta didik berlatih merupakan replika dari lingkungan tempat mereka akan bekerja yaitu menggunakan cara, alat dan mesin yang sama seperti yang diterapkan di tempat kerja.
- 2) memberi pengalaman berlatih yang berulang-ulang untuk membentuk kebiasaan kerja dan kebiasaan berfikir yang benar seperti yang diperlukan dalam pekerjaannya kelak .
- 3) mampu memotivasi setiap individu untuk mencapai pengetahuan dan keterampilan sampai pada tingkat yang paling tinggi.
- 4) guru menguasai kompetensi dan metode pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik dan karakteristik materi yang diajarkan
- 5) terdapat standar kemampuan minimum yang harus dimiliki oleh setiap pekerjaan yang mengacu pada pengalaman para ahli pada pekerjaan tersebut.

- 6) memperhatikan permintaan pasar dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik
- 7) tersedia biaya yang memadai untuk menyelenggarakan pendidikan kejuruan

Berdasarkan prinsip-prinsip pendirian pendidikan kejuruan yang telah dipaparkan di atas, penambahan jumlah SMK bukan suatu kebijakan yang harus dilakukan oleh semua daerah. Kebijakan perimbangan proporsi SMK:SMA menjadi 67:33 harus disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Dengan demikian, penerapan kebijakan di DIY dapat berbeda dengan penerapan kebijakan di daerah lain. Peningkatan peserta didik SMK sangat diperlukan oleh daerah yang sedang membangun industri yang berlandaskan pada pengembangan ekonomi kreatif.

Pendidikan lebih bermakna apabila relevan dengan kebutuhan tenaga kerja. Hasil kajian Emidawati (2010) terhadap perkembangan pendidikan kejuruan di kota Medan diperoleh rekomendasi dari pakar-pakar pendidikan di kota tersebut yaitu: “Rencana penambahan jumlah peserta didik SMK perlu dipertimbangkan kembali. Mutu SMK perlu ditingkatkan terlebih dahulu supaya dayatarik masyarakat terhadap pendidikan kejuruan meningkat. Menurut penilaian para pakar dan mitra industri, kompetensi lulusan pendidikan kejuruan belum sepenuhnya memenuhi standar industri. Lulusan SMK yang bekerja di industri masih harus dididik dan dilatih kembali sehingga memerlukan biaya tambahan. Beberapa pengusaha yang merekrut lulusan SMK dan SMU, menyatakan bahwa lulusan SMU jika dilatih juga akan memiliki keterampilan yang tidak jauh berbeda dengan lulusan SMK. Selanjutnya disarankan agar dibangun kerja sama dengan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta berbagai pihak swasta yang memerlukan tenaga kerja terampil. Kerjasama tersebut diharapkan dapat mengubah sistem pendidikan dari *output oriented* menjadi *job oriented* sehingga angkatan kerja yang baru sudah siap masuk ke pasar kerja.

Kebijakan peningkatan jumlah peserta didik SMK menjadi 67% pantas dikaji ulang. Berdasarkan hasil studi literatur, tidak semua komponen pendidikan siap melaksanakan. Kebijakan dapat dilaksanakan secara bertahap sambil menyiapkan infrastruktur yang diperlukan oleh SMK.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian meta-analisis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara merangkum, mereview dan menganalisis data penelitian dari beberapa hasil penelitian sebelumnya (Neill, 2006). Dengan menggunakan meta-analisis, beragam pertanyaan dapat ditelusur sepanjang pertanyaan tersebut logis dan tersedia data untuk menjawabnya.

Penelitian diawali dengan merumuskan masalah dan tujuan penelitian kemudian dilanjutkan dengan menelusuri hasil-hasil penelitian terbaru yang relevan. Dari data penelitian yang telah diperoleh oleh peneliti sebelumnya, peneliti kemudian menganalisis data dan melaporkannya kembali dalam bentuk penelitian baru. Dengan demikian, laporan penelitian ini bukan duplikasi dari penelitian yang sudah pernah dilakukan.

B. Sumberdata Penelitian

Sumberdata penelitian ini adalah tiga buah judul penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian dosen Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Laporan penelitian terdokumen di perpustakaan Lembaga Penelitian UNY. Semua penelitian dilaksanakan pada tahun 2009 sehingga menjamin temuan dalam penelitian ini masih baru. Judul penelitian yang menjadi sumber data adalah:

1. *Kesiapan Pemerintah DIY terhadap kebijakan perluasan SMK* yang diteliti oleh Hajar Pamadhi, dkk;
2. *Pemetaan SMK se Indonesia* yang diteliti oleh Sudji Munadi, dkk; dan
3. *Relevansi spektrum pasar kerja dengan program studi yang ada di SMK se kabupaten Bantul* yang diteliti oleh Suparman, dkk.

Selain analisis meta laporan hasil penelitian, data penelitian juga dilengkapi dengan data PPDB (Pendaftaran Peserta Didik Baru) tahun 2008/2009 dan data statistik pendidikan yang diperoleh dari Dinas Pendidikan tiap-tiap kabupaten se propinsi DIY.

Data penelitian pada meta-analisis adalah berupa data sekunder yang diambil dengan metode dokumentasi. Jenis sumberdata yang digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan penelitian dapat dipaparkan pada tabel 2.

Tabel 2. Sumber Data Penelitian

No	Tujuan Penelitian	Sumber data
1.	Animo masyarakat untuk mengakses pendidikan di SMK	Dokumen PPDB Dinas Pendidikan prop. DIY tahun 2008/2009
2.	Pencapaian proporsi SMK:SMA sebesar 67:33	Data profil pendidikan DIY dan laporan penelitian an Sudji, M. dkk
3.	Cara peningkatan jumlah peserta didik SMK di propinsi DIY	
4.	Kelayakan pengembangan program studi keahlian SMK	Laporan penelitian an Hajar, P., dkk
5.	Kesiapan sekolah untuk memperluas program studi keahlian SMK	
6.	Dukungan Pemerintah terhadap kebijakan peningkatan peserta didik SMK	
7.	Daya serap lulusan SMK	Laporan penelitian an Suparman, dkk

C. Metode Analisis Data

Data pada laporan penelitian yang diacu masih sangat luas dan banyak. Dalam laporan ini, data diolah kembali dengan cara merangkum dan mengambil intisari hasil penelitian saja. Selanjutnya, data dilaporkan kembali secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis kelayakan peningkatan jumlah peserta didik SMK dipelajari dari kelayakan input, proses dan output. Hasil penelitian dilaporkan secara kronologis sesuai dengan urutan tujuan penelitian, yaitu pemaparan: (1) animo masyarakat untuk mengakses pendidikan di SMK; (2) pencapaian proporsi SMK:SMA sebesar 67:33; (3) kelayakan pengembangan program studi keahlian SMK; (4) cara peningkatan jumlah peserta didik SMK; (5) daya serap lulusan SMK; (6)

kesiapan sekolah untuk memperluas program studi keahlian SMK; (7) dukungan Pemerintah terhadap kebijakan peningkatan peserta didik SMK

A. Animo Masyarakat DIY terhadap SMK

SMK memiliki 121 kompetensi keahlian, namun tidak semua kompetensi keahlian tersebut mempunyai animo masyarakat yang bagus. Berdasarkan data dokumen SMK propinsi DIY, SMK Negeri kabupaten Bantul menawarkan 36 jenis kompetensi keahlian, SMK Negeri kota Yogyakarta menawarkan 33 jenis kompetensi keahlian dan kabupaten Sleman menawarkan 25 jenis kompetensi keahlian. Sekolah swasta sangat antusias dalam merespon kebijakan peningkatan proporsi SMK:SMA dengan membuka kompetensi keahlian yang banyak diminati oleh masyarakat. Jumlah kelas (rombongan belajar) dan jumlah peserta didik yang diterima di SMK swasta terkadang lebih besar dari SMK Negeri. Sebagai contoh, jumlah kelas yang dibuka SMK swasta kabupaten Gunung Kidul sebanyak 56 dari 16 SMK swasta padahal SMK Negeri hanya membuka 39 kelas dari 16 SMK (Hajar Pamadhi, 2009).

Hasil analisis data dokumen jumlah peserta didik menurut kompetensi keahlian SMK di wilayah DIY pada tahun 2008/2009 yang diperoleh dari data statistik pendidikan tiap-tiap kabupaten menunjukkan ada kompetensi keahlian yang banyak dipilih dan tidak banyak dipilih masyarakat. Hampir semua SMK yang membuka kompetensi keahlian Mekanik Otomotif dapat memperoleh jumlah peserta didik sesuai dengan dayaampungnya. Beberapa sekolah justru membuka kompetensi keahlian Mekanik Otomotif lebih dari satu kelas. Sementara itu, program studi keahlian Seni Pertunjukan, Perikanan dan Pertanian tidak banyak dipilih masyarakat. Meskipun hanya dibuka oleh satu SMK, program keahlian inipun tidak dapat memenuhi dayaampung peserta didik yang disediakan.

Joko Sutrisno dalam harian Bisnis Indonesia (2008) menjelaskan lulusan SMK yang banyak diserap oleh dunia kerja adalah lulusan SMK bisnis manajemen, teknologi, *hospitality*, dan pertambangan. Untuk *hospitality industry* ada permintaan dari Qatar, Kuwait, dan London bagi 200 orang

lulusan SMK untuk menjadi asisten juru masak, asisten bartender, staf *front office*, dan lainnya.

Kebutuhan tenaga kerja lulusan SMK di setiap daerah berbeda-beda. Dalam satu waktu dan tempat tertentu dibutuhkan program keahlian yang mendukung pertumbuhan industri sedangkan pada waktu yang bersamaan di tempat lain lebih banyak dibutuhkan tenaga kerja yang mendukung sektor jasa pariwisata. Letak geografis dan lingkungan industri memiliki peran yang cukup besar dalam menentukan jenis kompetensi keahlian yang banyak di butuhkan. Lingkungan perkotaan lebih banyak membutuhkan program keahlian kelompok Teknologi dan Rekayasa sedangkan lingkungan pedesaan banyak membutuhkan program keahlian kelompok Agribisnis dan Agroteknologi. Meskipun demikian, animo masyarakat tidak selalu sama dengan kebutuhan riil tenaga kerja yang ada di lingkungannya. Hal ini terbukti dari kompetensi keahlian Agribisnis dan Agroteknologi yang dibuka di wilayah pedesaan ternyata belum mampu memperoleh jumlah peserta didik yang memadai.

Kelayakan penambahan jumlah peserta didik SMK pada masa yang akan datang didukung oleh data animo calon peserta didik yang memilih kompetensi keahlian SMK. Sekolah menjadi favorit dan unggul apabila jumlah pendaftar peserta didik baru melebihi daya tampungnya sehingga terjadi kompetisi antar calon peserta didik. Berdasarkan laporan PPDB (Pendaftaran Peserta Didik Baru) SMK N dari tiap-tiap kabupaten di propinsi DIY, dapat diamati animo calon peserta didik SMK Negeri sebagai berikut:

1. Kota Yogyakarta

Pada tahun 2009, jumlah pendaftar SMK Negeri terbanyak terdapat di SMK Negeri 6 dan SMK N 2 Yogyakarta dengan rasio seleksi sebesar 1,9 dan 1,82. Sebaliknya jumlah pendaftar yang paling sedikit terdapat pada SMK N 5 Yogyakarta dengan rasio seleksi 1,01 (Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, 2009). Jumlah pendaftar SMK kota Yogyakarta selama tiga tahun berfluktuatif, yaitu tidak menunjukkan selalu ada peningkatan atau sebaliknya. Seleksi calon peserta didik yang ketat cenderung terjadi pada

kelompok program keahlian Pariwisata, Teknologi dan Rekayasa. Data PPDB yang telah diperoleh di atas tidak murni menunjukkan animo masyarakat kota Yogyakarta terhadap SMK karena SMKN di kota Yogyakarta banyak menerima input siswa dari luar kota Yogyakarta.

2. Kabupaten Sleman

Jumlah pendaftar di SMK N kota Sleman selalu lebih banyak dibandingkan dengan dayaampungnya kecuali di SMK N Cangkringan. Hal ini disebabkan karena SMK Negeri Cangkringan hanya membuka dua program keahlian yaitu Budidaya Ternak dan Pengolahan Hasil Pertanian. Jumlah peserta didik SMK N Cangkringan berkisar antara 43 – 60 per angkatan selama tiga tahun terakhir. Meskipun hanya di buka oleh satu SMK di Sleman ternyata kompetensi keahlian ini kurang diminati masyarakat. SMK N 1 Godean dan SMK N 1 Depok memiliki rasio jumlah peserta didik yang diterima dengan jumlah calon peserta didik yang mendaftar sebesar 1 : 1,3. Dua SMK tersebut memiliki program keahlian yang sejenis yaitu Akuntansi, Sekretaris dan Penjualan (Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, 2009).

3. Kabupaten Kulonprogo

Data pendaftar SMK N Kulonprogo tahun 2008/2009 menumpuk pada kecamatan Pengasih yaitu di SMK N 1 dan SMK N 2 Pengasih. SMK N 1 Pengasih membuka multi program keahlian yaitu TIK, Bisnis dan Manajemen serta Pariwisata. Berdasarkan rasio seleksi, SMK N 1 Pengasih memiliki rasio jumlah pendaftar dan jumlah peserta didik yang diterima paling tinggi yaitu 2,57 : 1. SMK N 1 Panjatan berada pada peringkat berikutnya yaitu 1,63 : 1. SMK N Panjatan yang membuka kompetensi keahlian Seni Kriya dan merupakan unit SMK baru yang beroperasi mulai tahun 2007/2008 mempunyai animo yang cukup bagus dari masyarakat. Sementara itu, SMK N yang lain hanya memiliki rasio jumlah pendaftar dan jumlah peserta didik yang diterima mendekati 1 (satu) atau dengan kata lain, hampir semua calon peserta didik yang mendaftar di SMK tersebut dapat diterima (Dinas Pendidikan Kabupaten Kulonprogo, 2009).

Data tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat lebih banyak memilih SMK karena mutu sekolah. SMK yang mendapat predikat mutu selalu dicari orang. Selain itu, masyarakat juga banyak memilih SMK karena program keahliannya relevan dengan kebutuhan dunia kerja, sehingga siswa yang masuk SMK mengharapkan dapat segera memperoleh pekerjaan setelah lulus.

4. Kabupaten Gunung Kidul

Semua SMK yang berada di kota Wonosari memiliki jumlah calon peserta didik yang mendaftar dan jumlah peserta didik yang diterima dengan rasio lebih dari satu. Secara rinci, rasio seleksi peserta didik tahun 2008/2009 di SMKN 1 Wonosari (1,15), SMKN 2 Wonosari (1,83) dan SMKN 3 Wonosari (1,63). SMK N 2 Wonosari membuka program keahlian kelompok Teknologi dan Rekayasa, SMK N 3 Wonosari membuka multi program yaitu Teknik Elektronika Industri, Teknik Audio Video, dan JASA BOGA sedangkan SMK N 1 Wonosari berasal dari SMK Bisnis dan Manajemen yang memperluas program dengan membuka kompetensi keahlian Tata Busana dan Multimedia.

Gunung Kidul memiliki dua unit SMK N baru (USB) yaitu SMKN Nglipar dan SMKN Tepus. Pada tahun 2008, dua unit SMK baru ini belum menerima peserta didik. SMK N di daerah Gunung Kidul yang berada di luar kota Wonosari memiliki jumlah pendaftar yang sesuai dengan daya tampung. Hal ini menunjukkan tidak ada kompetisi dalam proses seleksi peserta didik baru. Letak geografis kabupaten Gunung Kidul yang sebagian besar berupa pegunungan menjadi kendala bagi masyarakat untuk dapat mengakses pendidikan (Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul. 2009).

Gunungkidul lebih potensial untuk mengembangkan SMK dibanding kabupaten lain. Dilihat dari sudut sosial ekonomi masyarakatnya yang kebanyakan berada pada tingkat ekonomi menengah ke bawah, peningkatan jumlah peserta didik memang cukup relevan. Namun demikian, kabupaten Gunungkidul bukan daerah industri sehingga SMK yang berkembang di sana kesulitan mencari industr pasangan. Meskipun lulusan SMK tidak

semua terserap di daerah tersebut, lulusan SMK Gunungkidul potensial untuk menjadi tenaga kerja di daerah lain.

5. Kabupaten Bantul

Rasio seleksi peserta didik baru di SMKN kabupaten Bantul sudah mulai merata ke semua kecamatan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan di kota Bantul tidak terpusat di kota kabupaten saja melainkan sudah dapat dinikmati oleh kecamatan lain yang jauh dari pusat kabupaten. Rasio seleksi yang cukup ketat terjadi di SMKN 1 Bantul (1,73 : 1); SMKN 2 Sewon (1,59 : 1); SMK 3 Kasihan (1,57 : 1); SMK 1 Sedayu (1,65:1). SMKN 1 Bantul membuka program studi keahlian kelompok Bisnis dan Manajemen yang memperluas kompetensi keahlian Multimedia dan Teknik Komputer dan Jaringan. SMK 1 Sedayu membuka program studi keahlian kelompok Teknologi dan Rekayasa. SMK Negeri 3 Kasihan membuka program studi keahlian kelompok Seni dan Kerajinan sedangkan SMK N 2 Sewon membuka program studi keahlian kelompok Pariwisata (Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul, 2009).

Kabupaten Bantul potensial untuk mengembangkan SMK dari berbagai program keahlian. Animo masyarakat kabupaten Bantul terhadap SMK juga relatif bagus. Hal ini dikarenakan ada SMK Bantul yang sudah melakukan kerjasama dengan luar negeri dan memasok tenaga kerja ke industri tersebut. Jenis industri yang menerima lulusan SMK dari kabupaten Bantul adalah industri garment dan pariwisata (hotel).

B. Pencapaian Proporsi sebesar SMK:SMA 67:33

Rasio jumlah SMK:SMA sebesar 67:33 dapat memberi makna rasio jumlah peserta didik dan rasio jumlah sekolah. Apabila sekolah negeri dan sekolah swasta di jumlahkan maka tiap-tiap kabupaten memiliki jumlah SMK lebih banyak dari jumlah SMA. Rasio jumlah SMK:SMA di kabupaten Kulonprogo sebesar 64,6: 35,4. Rasio jumlah SMK:SMA di kabupaten Gunung Kidul sebesar 61,9:38,1. Rasio SMK:SMA di kabupaten Sleman sebesar 52,5:47,5. SMK swasta memberi kontribusi yang cukup besar pada penerapan kebijakan proporsi SMK:SMA sebesar 67:33. Contoh nyata terdapat di

kabupaten Sleman yaitu dari 54 SMK yang terdaftar di Dinas Pendidikan kabupaten Sleman, 44 SMK di antaranya adalah SMK swasta. Demikian pula di kabupaten Kulonprogo, dari 31 SMK yang terdaftar di Dinas Pendidikan kabupaten Kulonprogo hanya terdapat 6 SMK yang berstatus negeri (Sudji Munadi, 2009).

Rasio jumlah SMK dan SMA negeri di kabupaten Gunung Kidul dan Bantul sudah seimbang. SMK Negeri merespon kebijakan perluasan SMK dengan menambah kompetensi keahlian baru sehingga secara otomatis menambah daya tampung peserta didik. Dengan kompetensi keahlian yang lebih banyak menyebabkan jumlah peserta didik SMKN dan SMAN menjadi seimbang, meskipun jumlah SMK N lebih sedikit dari jumlah SMA N. Setelah jumlah peserta didik sekolah negeri dan swasta digabung, proporsi peserta didik SMK:SMA pada tahun 2007/2008 di kota DIY adalah sebagai berikut: Kabupaten Gunung Kidul memiliki jumlah peserta didik SMK:SMA dengan proporsi sebesar 66,9 : 33,1, kabupaten Sleman sebesar 60:40, dan kabupaten Kulonprogo sebesar 59,1 : 40,9. Peserta didik yang memiliki orientasi untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi, lebih banyak memilih jalur SMA sebab lebih menguntungkan dalam proses seleksi (Hajar Pamadhi, 2009).

Rasio jumlah peserta didik SMK:SMA di propinsi Yogyakarta sudah lebih banyak SMK daripada SMA. Proporsi jumlah peserta didik SMK:SMA belum mencapai 67% : 33% namun sudah cukup ideal untuk dipertahankan. Apabila jumlah peserta didik SMK masih ditingkatkan lagi, dikhawatirkan akan terjadi kejenuhan tenaga kerja. Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki banyak perguruan tinggi, sehingga apabila lulusan sekolah menengah banyak yang tidak melanjutkan studi, perguruan tinggi akan kehilangan calon mahasiswa asli daerah.

C. Kelayakan Pengembangan Jenis Kompetensi Keahlian

Hasil identifikasi jenis kompetensi keahlian yang dibuka oleh SMK pada 4 kabupaten (tanpa kabupaten Kulonprogo) wilayah propinsi DIY diperoleh 58 kompetensi keahlian dari 121 kompetensi keahlian yang terdapat pada spektrum SMK. Secara berturut-turut, jumlah SMK yang membuka kompetensi

keahlian sesuai dengan rumpun kelompok bidang studi keahlian SMK pada tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Kelompok bidang studi keahlian Teknologi dan Rekayasa didominasi oleh kompetensi keahlian Mekanik Otomotif yang dibuka oleh 46 SMK
2. Kelompok bidang studi keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi yang memiliki prospek bagus adalah kompetensi keahlian Multimedia dibuka oleh 27 SMK dan TKJ (Teknik Komputer dan Jaringan) dibuka oleh 23 SMK.
3. Kelompok bidang studi keahlian Seni, Kerajinan dan Pariwisata yang banyak diminati adalah kompetensi keahlian Tata Busana Butik (25), Kriya Kayu (7), Akomodasi Perhotelan (7) dan jasa Boga (6) SMK.
4. Kelompok bidang studi keahlian Bisnis dan Manajemen yang mendapat respon cukup baik adalah kompetensi keahlian Akuntansi (36) dan Pemasaran (21) SMK.
5. Kelompok bidang studi keahlian Agrobisnis dan Kesehatan tidak banyak berkembang di DIY, namun PT yang membuka program studi Kesehatan dan Pertanian cukup banyak.

Beberapa program studi keahlian membutuhkan lingkungan geografis khusus sehingga hanya berpotensi dibuka di wilayah yang khusus juga. Sebagai contoh, program studi keahlian Pelayaran hanya cocok dibuka di wilayah yang memiliki laut yaitu Kabupaten Bantul, Gunung Kidul dan Kulonprogo. Sementara itu, program studi keahlian akuntansi bisa dibuka di mana-mana karena tidak membutuhkan perlengkapan laboratorium khusus. Ketersediaan sarana prasarana (bengkel dan laboratorium) SMK menjadi syarat mutlak sehingga kompetensi keahlian yang membutuhkan sarana prasarana yang relatif mahal harganya tidak banyak dibuka.

Menurut hasil penelitian Suparman (2009) diperoleh temuan penyerapan lulusan SMK di kabupaten Bantul pada tahun 2007/2008 yang mencapai 100% terdapat pada jenis kompetensi keahlian: (1) Tata Kecantikan; (2) Rekayasa Perangkat Lunak; (3) Broadcast, (4) Budidaya Tanaman dan (5) THP

Perikanan. Pada tahun yang sama kompetensi keahlian yang daya serapnya masih rendah (<33%) terdapat pada kompetensi keahlian Seni Tari dan Seni Karawitan. Pada tahun 2009, kompetensi keahlian yang memiliki daya serap tinggi (>90%) terdapat pada kompetensi keahlian THP Perikanan dan Tata Busana sedangkan yang daya serapnya rendah (>33%) adalah kompetensi keahlian Seni Tari dan Rakayasa Perangkat Lunak.

Menurut hasil penelitian tersebut dapat diketahui tidak semua program keahlian yang memiliki animo masyarakat tinggi dapat memiliki daya serap tenaga kerja yang tinggi pula. Sebagai contoh kompetensi keahlian mekanik otomotif hanya terserap 72,87% pada tahun 2007/2008 dan 49,41% pada tahun 2008/2009. Dengan demikian, SMK dapat mengalami kejenuhan lulusan apabila program keahlian tersebut di buka secara besar-besaran.

Menurut Standar Pelayanan Minimal, jumlah peserta didik yang ideal dalam satu rombongan belajar (kelas) di sekolah menengah adalah sebanyak 30 orang. Apabila jumlah rombongan belajar kurang dari jumlah tersebut, maka sebaiknya dilakukan merger atau penggabungan. Berdasarkan standar yang telah ditetapkan tersebut dapat dianalisis program keahlian yang layak atau tidak layak di buka.

Berdasarkan data jumlah peserta didik menurut program studi keahlian yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten di provinsi DIY, terdapat kecenderungan program keahlian yang favorit dan kurang favorit di masyarakat. Pada saat ini, masyarakat cenderung memilih kompetensi keahlian SMK yang mampu memberi bekal keterampilan berwirausaha. Kecenderungan ini telah mengakibatkan SMK program studi keahlian Seni Pertunjukan kurang mendapat minat masyarakat tetapi program studi keahlian ini tetap dipertahankan untuk melestarikan budaya kesenian. Pada tahun 2007/2008, program studi keahlian Seni Pedalangan hanya memiliki 2 orang peserta didik dan Seni Teater memiliki 6 orang peserta didik. Program studi keahlian lain yang kurang mendapat respon dari masyarakat adalah Perikanan dan Teknik Kapal Penangkap Ikan yang masing-masing memiliki jumlah peserta didik kurang dari 25 orang (Hadjar P, 2009).

Program studi keahlian seni yang masih mendapat respon positif dari masyarakat adalah kompetensi keahlian Desain Komunikasi Visual dan Seni Kriya. Kedua kompetensi keahlian tersebut telah menggabungkan unsur seni, teknologi dan wirausaha sehingga seni tidak hanya sekedar untuk dinikmati tetapi sudah dapat dimanfaatkan untuk berwirausaha.

Eksistensi program studi keahlian SMK tidak bersifat permanen karena kebutuhan masyarakat terhadap bidang keahlian SMK selalu berubah seiring dengan perubahan kebijakan ekonomi pada sektor industri dan jasa. SMK swasta memiliki cara tersendiri supaya dapat bertahan hidup yaitu hanya membuka program-program keahlian yang memiliki prospek cukup bagus. Oleh sebab itu, Program studi keahlian di SMK swasta lebih sedikit daripada SMK Negeri. Hasil wawancara dengan Kasubdit PMK Bantul, beberapa hal yang dipertimbangkan SMK swasta dalam memilih program studi keahlian yang dibuka antara lain: (1) program studi keahlian cukup favorit sehingga banyak calon peserta didik yang tidak tertampung di SMK Negeri; (2) program studi keahlian tidak memerlukan fasilitas laboratorium yang mahal harganya; (3) program keahlian sesuai dengan trend perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar kerja.

D. Cara Peningkatan Jumlah Peserta Didik SMK

Perluasan SMK: SMA menjadi 67:33 dilakukan dengan tiga macam cara yaitu penambahan program studi keahlian baru pada SMK yang sudah ada, alih fungsi SMA menjadi SMK, dan penambahan unit SMK baru. Dari tiga macam cara tersebut, cara yang pertama merupakan cara yang paling efisien. Kebijakan perluasan jumlah SMK sudah direspon oleh SMK khususnya SMK swasta maupun negeri. SMK langsung merespon dengan membuka program studi keahlian yang sedang favorit di masyarakat. Perluasan SMK yang dilakukan dengan alih fungsi SMA menjadi SMK dilakukan oleh beberapa sekolah swasta yang sedang mengalami kejenuhan dengan penyelenggaraan SMA.

Hasil studi di lapangan menunjukkan bahwa alih fungsi SMA menjadi SMK tidak dilakukan secara mutlak. Sekolah yang menyebutkan dirinya alih fungsi masih tetap menyelenggarakan pendidikan umum SMA dan sudah mulai merintis dengan membuka program studi keahlian SMK. Perluasan SMK dengan mendirikan unit sekolah baru (USB) hanya dilakukan bagi daerah yang potensial didirikan USB SMK. Untuk wilayah DIY penambahan USB dilakukan oleh Kabupaten Bantul mendirikan 3 USB yaitu SMKN Pajangan, SMKN Sanden dan SMK N Dlingo. Gunung Kidul membuka 2 USB yaitu SMKN Tepus dan SMKN Ponjong. Kulonprogo menambah 1 USB yaitu SMKN Panjatan (Hajar, P, 2009).

Peningkatan jumlah peserta didik SMK melalui pendirian USB kurang efisien dilakukan meskipun untuk wilayah kabupaten Bantul dan Gunungkidul telah menargetkan ada satu SMK di setiap kecamatan. Hal-hal yang menyebabkan pendirian USB kurang efisien antara lain karena sisi SDM guru, sarana prasarana yang menjadi kurang optimal penggunaannya, padahal pendirian SMK membutuhkan investasi yang mahal harganya. SMK yang memekarkan program keahlian dinilai lebih efisien karena untuk penyelenggaraan pendidikan minimal sudah tersedia fasilitas bersama. Selain itu, guru-guru untuk mata pelajaran yang umum juga sudah tersedia.

E. Daya Serap Lulusan SMK

Animo masyarakat terhadap kompetensi keahlian tertentu tidak diiringi dengan dengan daya serap lulusannya. Beberapa kompetensi keahlian yang favorit justru mengalami kejenuhan karena jumlah lulusannya terlalu banyak. Menurut laporan hasil penelitian Suparman (2009), daya serap lulusan SMK di kabupaten Bantul tahun 2007/2008 dan 2008/2009 dapat disimak pada tabel 3. Data pada tabel 3 tersebut telah diurutkan berdasarkan tingkat daya serapnya.

Tabel 3. Daya Serap Lulusan SMK Bantul

Kriteria	Program Keahlian
----------	------------------

	2007/2008	2008/2009
Tinggi ≥ 66,67%	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tata Kecantikan, ○ Rekayasa Perangkat Lunak, ○ Broadcast ○ Budidaya Tanaman ○ THP Perikanan ○ Budidaya Tanaman Sayuran ○ Teknik Gambar Bangunan ○ Penjualan ○ Teknik Las ○ Teknik Komputer Jaringan ○ Budidaya Tanaman Hias ○ Teknik Audio Video ○ Instalasi Listrik ○ Kriya Kayu ○ Seni Musik ○ Nautika Perikanan Laut ○ T Listrik Pemakaian ○ Tata Busana ○ Teknik Permesinan ○ Seni Rupa ○ Pemanfaatan Tenaga Listrik ○ PHP Pangan ○ Mekanik Otomotif ○ Akuntansi ○ Pekerjaan Sosial ○ Informatika ○ Akomodasi Perhotelan ○ Multi Media 	<ul style="list-style-type: none"> ○ THP Perikanan ○ Tata Busana ○ Budidaya Tanaman Perkebunan ○ Informatika ○ Seni Musik ○ Nautika Perikanan Laut ○ Tata Kecantikan, ○ Broadcast ○ Akomodasi Perhotelan ○ Kriya Tekstil ○ Tata Boga
Sedang 33,3 – 66,7	<ul style="list-style-type: none"> ○ Budidaya Ternak Ruminansia ○ Tata Boga ○ Administrasi Perkantoran ○ Budidaya Ternak Unggas ○ Seni Pedalangan ○ Seni Teater 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Teknik Permesinan ○ Pekerjaan Sosial ○ Kriya Kayu ○ PHP Pangan ○ Budidaya Ternak Unggas ○ Teknik Komputer Jaringan ○ Penjualan ○ Kriya Keramik ○ Budidaya Tanaman Sayuran ○ Mekanik Otomotif ○ Teknik Audio Video ○ Penjualan ○ Teknik Las ○ Budidaya Tanaman Hias ○ Akuntansi ○ Seni Pedalangan ○ Instalasi Listrik ○ Seni Rupa ○ Pemanfaatan Tenaga Listrik ○ Multi Media ○ Budidaya Ternak Ruminansia ○ Administrasi Perkantoran ○ Seni Teater ○ Seni Karawitan
Rendah ≤ 33,3%	<ul style="list-style-type: none"> Seni Tari Seni Karawitan 	<ul style="list-style-type: none"> T Listrik Pemakaian Teknik Gambar Bangunan Seni Tari Rekayasa Perangkat Lunak

Data pada tabel 3 menunjukkan bahwa daya serap lulusan selalu berubah tergantung pada kebutuhan industri dan tenaga kerja pada saat itu. Solusi yang

tepat untuk mengantisipasi terjadinya pengangguran lulusan SMK adalah dengan membatasi jumlah peserta didik jangan sampai melebihi kapasitas penyerapan lulusan dan memberi keterampilan berwirausaha supaya lulusan yang belum terserap dapat membuka usaha sendiri.

F. Kesiapan Sekolah Memperluas SMK

Perluasan SMK sudah lama direncanakan, namun pendirian SMK baru memerlukan investasi dana yang sangat besar. Satgas pengembangan pendidikan dan pelatihan kejuruan di Indonesia (1997) memberi saran untuk: (1) Meningkatkan pemanfaatan fasilitas SMK untuk melayani berbagai jenis siswa dalam cakupan yang lebih luas; (2) memperbaiki mutu dan relevansi pendidikan kejuruan yang diberikan SMK kepada siswanya. Menurut satgas tersebut, meningkatkan pemanfaatan SMK yang telah ada lebih penting daripada menambah dan memperluas jumlah SMK, dengan tetap mempertimbangkan aspirasi kebutuhan lokal/daerah.

Kesiapan sekolah untuk melaksanakan kebijakan perluasan SMK digali dari kesiapan siswa, guru dan tenaga pendukung, sarana prasarana, dan kurikulum. Menurut hasil wawancara dengan Kepala SMK yang telah melaksanakan program perluasan dan Kabid SMK dari Dinas Pendidikan kabupaten diperoleh informasi sebagai berikut.

1. Input Siswa

Menurut hasil wawancara dengan kepala SMK diperoleh informasi program studi keahlian yang cenderung meningkat peminatnya masih didominasi oleh program keahlian Otomotif, Multimedia, Teknik Komputer dan Jaringan, Desain Komunikasi Visual, dan Rekayasa Perangkat Lunak. Program keahlian yang cenderung menurun peminatnya adalah Administrasi Perkantoran, Agribisnis Ternak Unggas, Kimia Industri, Kriya Tekstil dan Kriya Kayu. Program keahlian yang cenderung stabil peminatnya adalah Akuntansi, Tata Busana, Pemasaran, Teknik Gambar Bangunan, dan Teknik Ketenaga Listrik.

2. Kesiapan guru

Kesiapan guru melaksanakan program perluasan SMK digali dari jumlah guru, kesesuaian dengan bidang studi yang diampu, persyaratan kualifikasi pendidikan guru. Hasil diskusi terbatas dengan Kepala SMK yang melaksanakan perluasan program studi keahlian diperoleh informasi bahwa semua SMK perluasan masih mengalami kekurangan jumlah guru terutama guru mata diklat produktif yang sesuai dengan program studi keahlian yang baru diselenggarakan. Usaha sekolah untuk mengatasi hal ini adalah melakukan pengangkatan guru honorer, guru tidak tetap dan *Out sourcing*, dengan memanfaatkan guru sekolah lain yang memiliki program studi keahlian sama.

3. Kesiapan Kurikulum

Semua sekolah yang melaksanakan perluasan SMK menyatakan bahwa kurikulum telah siap dan tersedia. Perumusan tujuan dan standar kompetensi yang terdapat pada kurikulum sudah disesuaikan dengan tuntutan kompetensi dari dunia usaha/industri yang akan menggunakan lulusan. Kesiapan silabus dan RPP dinyatakan belum semua siap atau dengan kata lain baru sebagian guru yang membuat silabus dan RPP.

4. Kesiapan Sarana Prasarana

Kesiapan sarana dan prasarana sangat tergantung pada kemampuan awal sekolah. Unit sekolah baru menyatakan belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Sekolah yang memperluas program keahlian menyatakan sudah memiliki sarana dan prasarana tetapi belum semua mencukupi. Kesiapan ruang praktek, bengkel atau laboratorium dilaporkan belum semua memadai. Semua sekolah belum memiliki tenaga laboratorium sehingga tugas pengelolaan laboratorium masih dibebankan pada guru yang mengajar.

5. Kesiapan Industri Pasangan

Sebagian besar sekolah melaporkan belum memiliki industri pasangan yang memadai. Program studi keahlian Otomotif, Tata Busana dari SMK Muhammadiyah Imogiri, program studi keahlian Kriya Kayu dari SMK 3

Pajangan, dan program studi Desain Komunikasi Visual dari SMKN 3 Kasihan telah memiliki industri pasangan yang memadai.

G. Dukungan Pemerintah terhadap Kebijakan SMK

Dukungan terhadap perluasan SMK digali dari dukungan yang berasal dari pemerintah pusat, dinas pendidikan kabupaten dan masyarakat. Dukungan dari pemerintah pusat sebagian besar diberikan dalam bentuk BOP, beasiswa, guru PNS bagi sekolah swasta dan sarana prasarana bagi USB. Dukungan dari dinas pendidikan kabupaten diberikan dalam bentuk program pelatihan guru, pencarian dana, pembinaan guru, pengarahan, dan memfasilitasi program sekolah. bantuan dari masyarakat atau komite sekolah diberikan dalam bentuk dana, sosialisasi program sekolah, pengadaan sarana prasarana, dan keamanan sekolah. Dukungan dari pihak swasta diberikan dalam bentuk tempat magang/PI, komputer, beasiswa, dan masukan penyusunan silabus dan kurikulum .

SMK masih mengharapkan dukungan pemerintah untuk menyerap lulusan SMK. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan mendukung pertumbuhan ekonomi dan industri kreatif sehingga lulusan SMK terjamin masa depannya. Selain itu, peningkatan jumlah peserta didik SMK tidak boleh terlalu berlebihan karena akan menurunkan citra SMK itu sendiri apabila ternyata lulusan SMK lebih rendah kualitasnya dan tidak mampu bersaing dengan lulusan SMA.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Bersadarkan hasil analisis potensi DIY dalam mengimplementasikan kebijakan perimbangan proporsi SMK:SMA sebesar 67:33 dapat disimpulkan:

1. Animo masyarakat memilih SMK ditentukan oleh mutu SMK dan jenis kompetensi keahlian yang ditawarkan SMK. SMK RSBI yang membuka program keahlian teknologi dan rekayasa, pariwisata, bisnis dan manajemen mendapat animo calon peserta didik yang cukup tinggi.

2. Kebijakan perimbangan proporsi SMK:SMA sebesar 67:33 mendapat respon positif dari masyarakat Yogyakarta. Kebijakan perimbangan SMK:SMA sebesar 67:33 telah dapat dicapai oleh kabupaten Gunung Kidul dengan proporsi peserta didik SMK:SMA sebesar 67:33. Rasio jumlah peserta didik SMK:SMA negeri dan swasta di kabupaten Kulonprogo dan Sleman sebesar 60:40. Rasio jumlah SMK:SMA di kabupaten Kulonprogo sebesar 64,6: 35,4 sedangkan di kabupaten Gunung Kidul sebesar 61,9:38,1. Jumlah SMK swasta tiap-tiap kabupaten selalu lebih banyak dari SMK Negeri.
3. Kompetensi keahlian yang mendapat animo tinggi di masyarakat adalah kompetensi keahlian Mekanik Otomotif sedangkan yang mendapat animo rendah di masyarakat adalah program studi keahlian Seni Pertunjukan.
4. Peningkatan jumlah peserta didik SMK banyak dilakukan dengan cara membuka kompetensi keahlian baru di SMK yang sudah ada. Pembukaan unit sekolah baru masih mengalami kendala.
5. Daya serap lulusan setiap tahun berubah. Daya serap lulusan yang stabil berada pada posisi atas adalah kompetensi keahlian Budidaya Tanaman dan Tata Kecantikan, sedangkan yang daya serapnya rendah adalah kompetensi keahlian Seni Tari.
6. Kendala yang dihadapi sekolah dalam pelaksanaan kebijakan perluasan SMK adalah kurangnya guru bidang keahlian produktif dan industri pasangan tempat magang peserta didik SMK.
7. Pemerintah telah memberikan dukungan melalui pemberian dana operasional dan fasilitasi program pendidikan dan pelatihan bagi guru SMK

B. Saran

1. Dinas Pendidikan
 - a. Membuat pemetaan kompetensi keahlian SMK
 - b. Membatasi daya tampung kompetensi keahlian yang favorit supaya tidak terlalu jenuh
 - c. Membuat proyeksi kebutuhan tenaga kerja

2. Kepada SMK
 - a. Selalu meningkatkan mutu SMK sehingga lulusannya dapat bersaing dengan lulusan sekolah lain dan dapat memperoleh input siswa yang berkualitas
 - b. Memberi keterampilan yang dapat membekali lulusan untuk berwirausaha
 - c. Mendirikan miniatur usaha untuk memberi keterampilan yang lebih kontekstual dengan dunia kerja
3. Kepada Siswa SMK
 - a. Selalu meningkatkan kompetensinya agar dapat bersaing dengan dengan lulusan dari sekolah lain
 - b. Tidak terlalu fanatik dengan kompetensi keahlian yang favorit
 - c. Membekali diri dengan keterampilan ganda

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2008). *Qua vadis sekolah menengah kejuruan di indonesia implikasinya terhadap kebijakan proporsi jumlah Siswa SMK : SMU = 70 : 30*. Makalah disampaikan pada konvensi nasional AKPEKTINDO di UNP Padang tanggal 4-6 Juni 2008
- Anonim, (2010). Jumlah Pengangguran di Indonesia 9,43 Juta Orang. Jakarta: Tempo Interaktif Com, Senin, 05 Januari 2009.
- _____, (2009). Kalau tahun ini daya serap lulusan ke pasar kerja baru 50 persen, maka tiap tahun diharapkan ada kenaikan 5 persen. Jakarta: Kompas. Com. 26 Januari 2010.
- _____, (2008). Kebutuhan lulusan SMK di luar negeri. Jakarta: Harian Bisnis Indonesi, 5 Juni 2008
- Dedi Supriadi. ed. (2002). *Sejarah pendidikan teknik dan kejuruan*. Jakarta: Depdiknas, Dirjen Dikdasmen, Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan.
- Depdiknas. (2005). *Rencana strategis pendidikan nasional 2005-2009*. Jakarta: Depdiknas
- _____. (2010). *Rencana strategis pendidikan nasional 2010-2014*. Jakarta: Depdiknas
- Emidawati. (2010). Perkembangan pendidikan kejuruan di kota Medan. Makalah disampaikan pada seminar internasional APTEKINDO dengan tema:

peran LPTK dalam pengembangan pendidikan vokasi di Indonesia.
Denpasar, 30 April 2010

- Hajar Pamadhi. (2009). *Kesiapan Pemerintah DIY terhadap kebijakan perluasan SMK*. Laporan Penelitian. Yogyakarta: Lembaga Penelitian UNY
- Neill, J. (2006). Meta-analysis research methodology. <http://wilderdom.com>. Diakses tanggal 22 Juni 2010
- Setiawan, Nugraha. 2006. *Struktur ketenagakerjaan dan partisipasi angkatan kerja di Indonesia*. Bandung: Pusat Penelitian Kependudukan dan SDM Unpad.
- Soenaryo. (2002). Pendidikan teknik dan kejuruan dan pertumbuhan ekonomi pada pelita I dan II dalam Dedi Supriadi. ed. (2002) *Sejarah pendidikan teknik dan kejuruan* Jakarta: Depdiknas, Dirjen Dikdasmen, Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan.
- Sri Hardjoko, W, dkk. (1997). *Keterampilan menjelang 2020 untuk era global*. Jakarta, Depdiknas. laporan Satuan tugas pengembangan pendidikan dan pelatihan kejuruan di Indonesia
- Sudji Munadi. (2009). *Pemetaan guru SMK se-Indonesia*. Laporan Penelitian. Yogyakarta: Lembaga Penelitian UNY
- Suparman, dkk. (2009) *Relevansi spektrum pasar kerja dengan program studi yang ada di SMK se kabupaten Bantul*. Laporan Penelitian. Yogyakarta: Lembaga Penelitian UNY

Biodata:

Endang Mulyatiningsih, lahir di Banjarnegara, Jawa Tengah pada tanggal 11 Januari 1963. Menempuh pendidikan SD, SMP dan SPG di kabupaten yang sama kemudian melanjutkan studi S1, S2, dan S3 di Universitas Negeri Yogyakarta. Sejak tahun 1989 sampai sekarang menjadi dosen tetap di Jurusan Pendidikan Teknik Boga dan Busana. Bidang keahlian yang ditekuni adalah penelitian pendidikan sesuai dengan program studi terakhirnya yaitu Penelitian dan Evaluasi Pendidikan